

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Surakarta

by asnawi asnawi

Submission date: 09-Dec-2024 07:39PM (UTC+0900)

Submission ID: 2425287452

File name: Jurnal_Pemerintah_2_1_.docx (37.31K)

Word count: 2702

Character count: 18484

1

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Surakarta

Nadya Syechan A¹, Saskia Kartika Ayu W², Gabriell Fransiska M. Pangaribuan³,
Azzahra Intan Nuraini W⁴, Maurici Albertigati D. Sonda⁵

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email: 63221071@bsi.ac.id¹, 63221012@bsi.ac.id², 63236003@bsi.ac.id³,
63220513@bsi.ac.id⁴, 63220962@bsi.ac.id⁵

Alamat: Jl. Kramat Raya No. 98, Kwitang, Jakarta 10450

Korespondensi penulis: 63221071@bsi.ac.id

Abstract This study focuses on evaluating the presentation of regional financial statements by the Surakarta City Government for the year 2023, ensuring compliance with Government Accounting Standards (SAP). Employing a descriptive analysis method, the research involves the collection, processing, and interpretation of data to deliver accurate and comprehensive insights into the financial statements of the Surakarta City Government for that year. The findings reveal that, in 2023, the Surakarta City Government adhered to Government Accounting Standards by effectively presenting budget realization reports, balance sheets, cash flow statements, and accompanying notes on the financial statements.

Keywords Surakarta City, Regional Financial Statements, Government Accounting Standards.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2023, apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data agar dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2023 sesuai dengan SAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2023 telah mengikuti pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyajian laporan keuangannya, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata kunci: Kota Surakarta, Laporan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia Merupakan Negara Kepulauan terbesar kelima didunia sebanyak 17.508 pulau. Negara ini terdiri dari 38 provinsi dan 416 kabupaten, yang di bawah administrasinya terdapat kecamatan, kelurahan, dan desa. Salah satu provinsi penting di Indonesia adalah Jawa Tengah, yang memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Salah satu kota bersejarah di provinsi ini adalah kota Surakarta, yang erat kaitannya dengan kerajaan Mataram Islam. Kota Surakarta masih memegang tradisi dan budaya serta sejarah dengan latar belakang kesultanan Mataram Islam yaitu kesultanan Surakarta Hadiningrat dengan rajanya bergelar Susuhunan Pakubuwono.

Sebagai wilayah yang telah lama mengadopsi tata kelola administratif berbasis tradisi kesultanan, Kota Surakarta memiliki fondasi yang kokoh untuk membangun sistem pemerintahan yang modern. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 1950, Kota Surakarta resmi menjadi daerah otonom. Otonomi ini memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan tanggung jawab otonomi, Pemerintah Kota Surakarta menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP berbasis akrual bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penyusunan laporan tersebut juga mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 32. 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta

Laporan keuangan yang disusun mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat untuk memahami dan memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan transparansi ini, diharapkan ruang gerak tindak pidana korupsi dapat diminimalkan, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi

American Accounting Association, sebagaimana diungkapkan oleh (Soemarso 2018), mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk menyediakan dasar yang jelas dan tegas bagi para pengguna informasi tersebut dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan.

(Horngrén, Charles T. 2017) Akuntansi dapat dipahami sebagai suatu sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan menyampaikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Menurut Pasal 1 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi melibatkan serangkaian proses yang mencakup pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian keuangan. Selain itu, akuntansi juga memainkan peran penting dalam interpretasi hasil dan penyajian laporan keuangan yang jelas dan informatif.

Akuntansi Pemerintahan

(Halim dan Kusufi 2018) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut (Baswir 2016) akuntansi pemerintahan mencakup praktik akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak berorientasi pada laba, sehingga berfokus pada hubungan antara institusi pemerintahan dan lembaga non-profit secara umum.

Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan daerah adalah dokumen terstruktur yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan ini mencakup unit-unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi. Mereka diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara, atau lembaga yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat, serta organisasi-organisasi di dalam lingkungan pemerintah pusat atau daerah.

Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu komponen laporan keuangan daerah menyajikan data tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan suatu entitas pelaporan, yang dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan. Informasi ini memiliki peran penting bagi pengguna laporan untuk:

1 Menyediakan informasi sebagai berikut.

1. Menyediakan gambaran mengenai sumber, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

2. Menyampaikan informasi tentang realisasi anggaran secara keseluruhan, yang bermanfaat untuk menilai kinerja pemerintah dalam aspek efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran sesuai (PSAP No. 2 Ayat 6, 2005).

Tujuan utama pelaporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi yang memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran yang dicapai oleh entitas pelaporan. Perbandingan ini menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah disepakati oleh pihak legislatif dan eksekutif, sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 2 RI Nomor 24 Tahun 2005. Sementara itu, neraca bertujuan untuk memberikan gambaran **1** posisi keuangan entitas pelaporan, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Berdasarkan PSAP No. 1 Ayat 38 Tahun 2005, aset dalam neraca

diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar, sedangkan kewajiban dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, sebagaimana diatur dalam PSAP No. 1 Ayat 39 Tahun 2005.

Neraca mencakup setidaknya komponen-komponen berikut:

1. Kas dan setara kas.
2. Investasi jangka pendek.
3. Piutang, baik pajak maupun nonpajak.
4. Persediaan.
5. Investasi jangka panjang.
6. Aset tetap.
7. Kewajiban jangka pendek.
8. Kewajiban jangka panjang.
9. Ekuitas dana. (PSAP No. 1 Ayat 43 Tahun 2005).

Sementara itu, Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut disusun berdasarkan empat jenis aktivitas utama, yaitu aktivitas operasional, investasi pada aset nonkeuangan, pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran (PSAP No. 3 Ayat 14 Tahun 2005).

Arus kas bersih dari aktivitas operasional merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang memadai untuk mendanai aktivitas operasionalnya di masa depan tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal (PSAP No. 3 Ayat 18 Tahun 2005). Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang berkaitan dengan akuisisi dan pelepasan sumber daya ekonomi. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung layanan pemerintah kepada masyarakat di masa depan (PSAP No. 3 Ayat 23 Tahun 2005).

Arus kas dari aktivitas pembiayaan menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang terkait dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Informasi ini membantu memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah serta klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa depan (PSAP No. 3 Ayat 26 Tahun 2005).

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencakup penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak berdampak pada anggaran pendapatan, belanja, atau pembiayaan pemerintah. Contoh aktivitas ini meliputi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), seperti potongan Taspen dan Askes, dan kiriman uang yang merepresentasikan perpindahan kas antar Rekening Kas Umum Negara/Daerah (PSAP No. 3 Ayat 29 Tahun 2005).

Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk membuat laporan keuangan dapat dipahami secara luas, tidak hanya oleh manajemen entitas pelaporan tetapi juga oleh pembaca lainnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, catatan ini harus memuat informasi yang menjelaskan posisi dan kondisi keuangan entitas pelaporan, termasuk bagaimana kondisi tersebut dicapai, sehingga mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pendekatan ini dirancang untuk mengeksplorasi bagaimana Pemerintah Kota Surakarta menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen, termasuk peraturan pemerintah, undang-undang, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu mengorganisasi, memproses, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan gambaran temuan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2023 memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan selama satu tahun, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini disusun berdasarkan realisasi pendapatan dan pengeluaran belanja, serta pembiayaan yang diterima atau dikeluarkan melalui bendahara umum daerah. Khusus untuk pengeluaran yang digunakan untuk pengisian kas oleh pemegang kas, realisasinya didasarkan pada pengesahan pertanggungjawaban. Tujuan laporan ini adalah untuk menyajikan informasi tentang sejauh mana pendapatan dapat direalisasikan sesuai anggaran, pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan, serta

sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutupi defisit.

Neraca

Neraca Pemerintah Kota Surakarta tahun 2023 menggambarkan posisi keuangan daerah, yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas .

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan kas, meliputi sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama tahun 2023. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas yang diklasifikasikan berdasarkan empat aktivitas utama: operasional, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran.

Pembahasan

Analisis penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2023 telah mengikuti ketentuan dalam PSAP No. 2 Ayat 14 Tahun 2005. Laporan ini mencakup sejumlah komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pemerintah Kota Surakarta telah mengintegrasikan unsur-unsur tersebut ke dalam Laporan Realisasi Anggaran mereka, yang terdiri dari elemen pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Format laporan ini juga telah disesuaikan dengan PSAP, menampilkan ikhtisar daerah serta alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan ini memberikan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai dalam satu periode pelaporan.

Penyajian Neraca dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar yang perlu diperhatikan dalam pelaporan neraca adalah pengklasifikasian aset menjadi aset lancar dan nonlancar, serta pengelompokan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca Pemerintah Kota Surakarta telah disusun sesuai dengan ¹ PSAP No. 1 Ayat 43 Tahun 2005, dengan mencantumkan pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas dana.

Format neraca ini menyajikan posisi keuangan daerah secara menyeluruh, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kota Surakarta..

Penyajian Laporan Arus Kas Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

¹ Penyajian Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan PSAP No. 3 Ayat 14 Tahun 2005, yang mengklasifikasikan arus kas ke dalam empat komponen aktivitas, yaitu:

1. Arus kas dari aktivitas operasional
2. Arus kas dari aktivitas aset non keuangan
3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
4. Arus kas dari aktivitas nonanggaran.

Laporan arus kas ini menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi, serta kas pada tanggal pelaporan. Penerimaan kas mencakup semua aliran kas yang masuk ke kas daerah, sedangkan pengeluaran kas

mencerminkan semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mencakup penjelasan atau analisis terperinci mengenai nilai-nilai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi yang diwajibkan dan disarankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang wajar, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan, pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta disajikan dengan berbagai format, seperti narasi, bagan, grafik, daftar, skedul, atau bentuk lain yang lazim, yang memberikan ikhtisar singkat namun padat mengenai kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Agar informasi dalam laporan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain, Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan susunan yang mencakup:

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, serta pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.
3. Kebijakan akuntansi yang penting.
4. Penjelasan tentang pos-pos yang ada dalam Laporan Keuangan.
5. Pengungkapan mengenai pos-pos aset dan kewajiban yang berkaitan dengan penerapan basis akrual untuk pendapatan dan belanja, serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, khususnya untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
6. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan, seperti gambaran umum daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2023 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya mengikuti Pernyataan Nomor 24 Tahun 2005.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

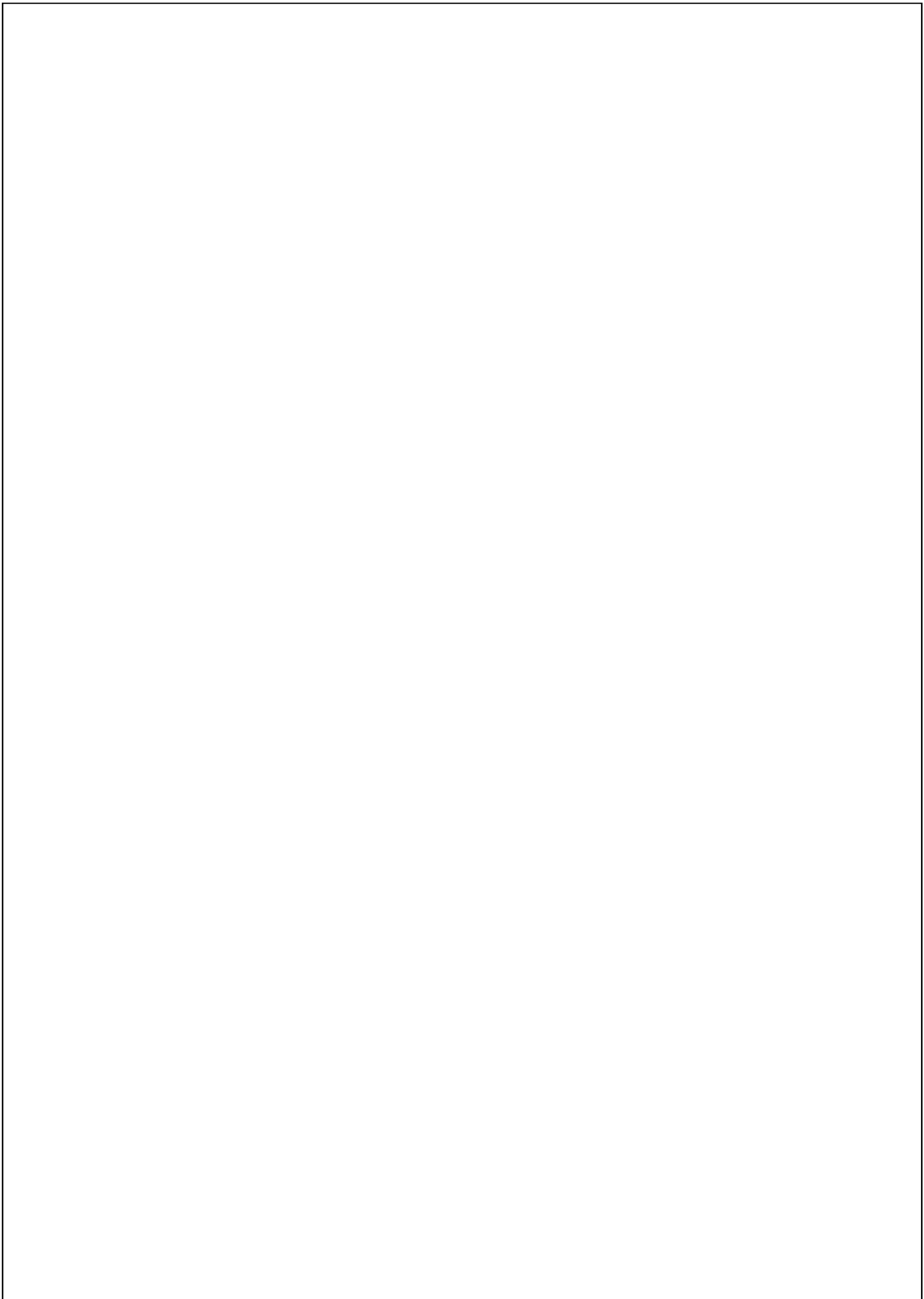
Berdasarkan penjelasan dan perbandingan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta sudah sesuai dengan PSAP Pernyataan No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Hal ini mencakup tujuan laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, ruang lingkup dan periode laporan, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Saran

Pemerintah Kota Surakarta perlu memperbarui kebijakan akuntansi sesuai standar terbaru, mengembangkan sistem akuntansi berbasis teknologi, dan mensosialisasikan laporan secara daring untuk transparansi. Memastikan pelaporan keuangan diaudit secara independen dan melaksanakan evaluasi internal secara rutin untuk menjaga kualitas pelaporan dan mengidentifikasi potensi perbaikan. serta pelatihan berkala bagi pegawai diperlukan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Baswir, Revrison. 2016. "Akuntansi Pemerintahan Di Simpang Jalan." *UNISIA*.
- Halim dan Kusufi. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Horngren, Charles T., dan Walter T. Harrison Jr. 2017. *Akuntansi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Kota Surakarta. 2023. "Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 32.2 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta."
- Pemerintah Pusat. 1950. *Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Pemerintah Pusat. 2004. *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *SAP Standar Akuntansi Pemerintah (PP RI No. 24 Th. 2005)*. Jakarta.
- Pemerintah RI. 2010. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. Jakarta, Indonesia.
- Soemarso. 2018. *Akuntansi: Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Salemba Empat.



6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

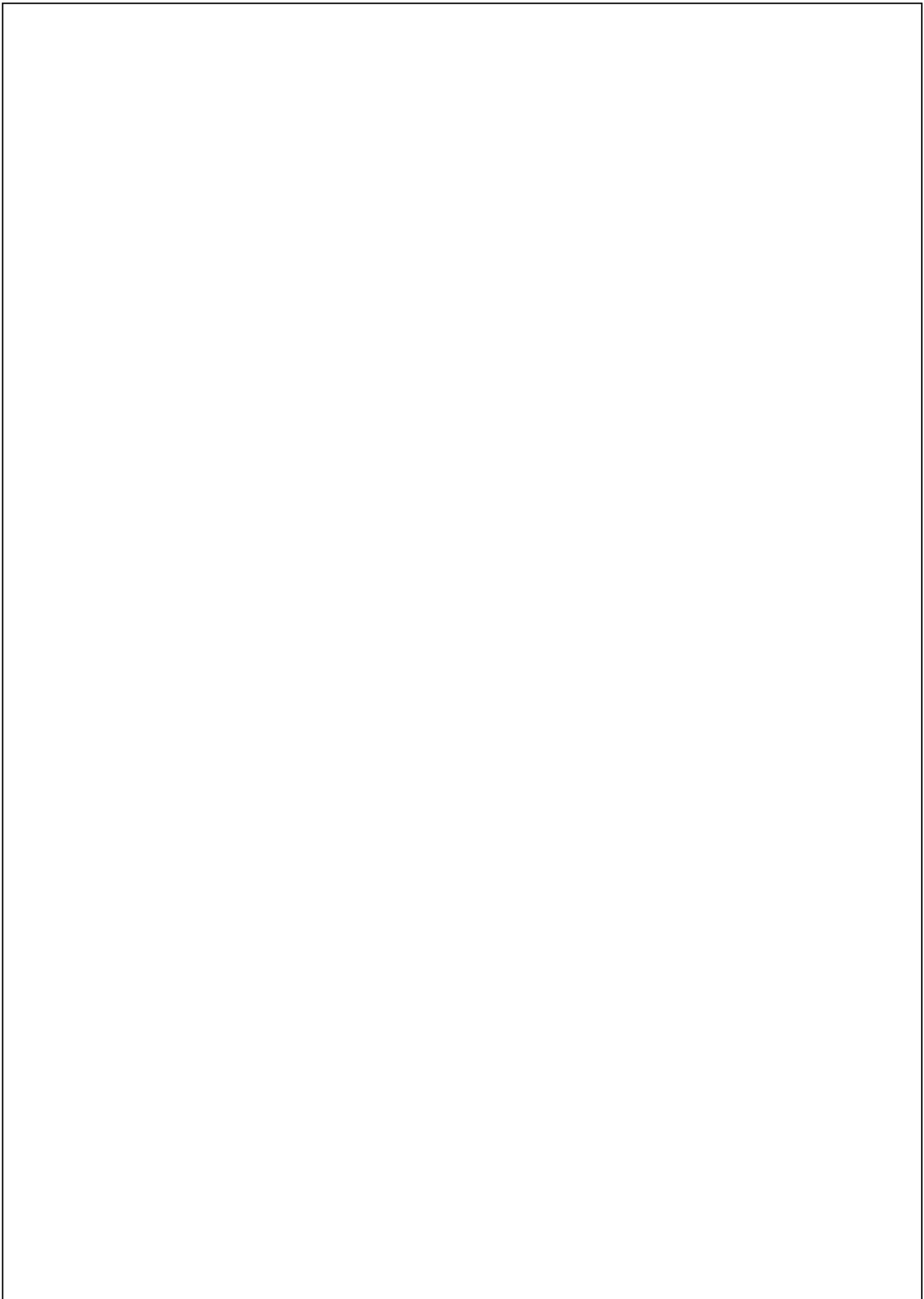
Melalui penjelasan dan perbandingan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan Kota Surakarta sudah mengacu pada PSAP Pernyataan No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan baik itu tujuan laporan keuangan, komponen- komponen Laporan Keuangan, ruang lingkup dan periode serta kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah daerah Kota Surakarta.

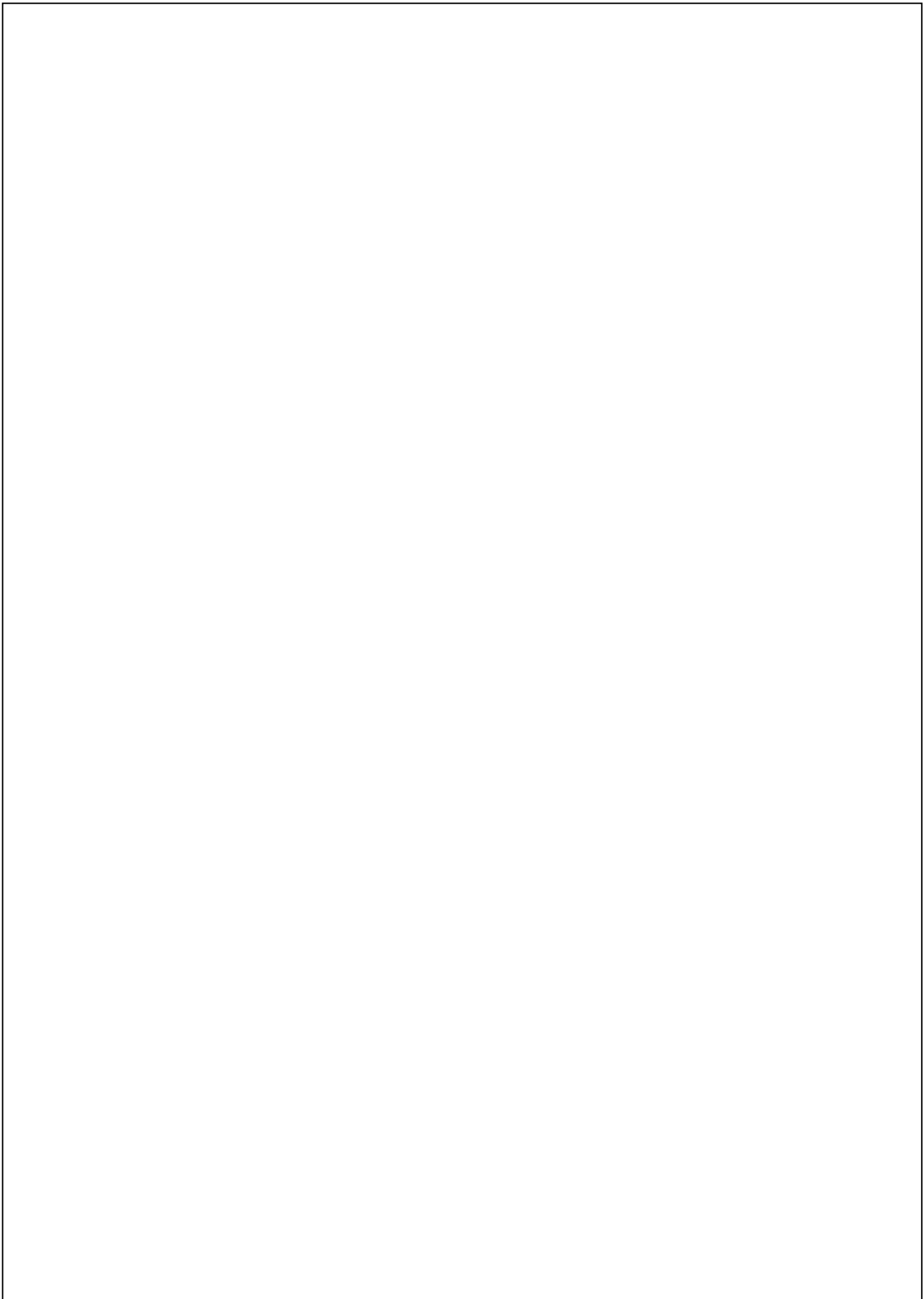
Saran

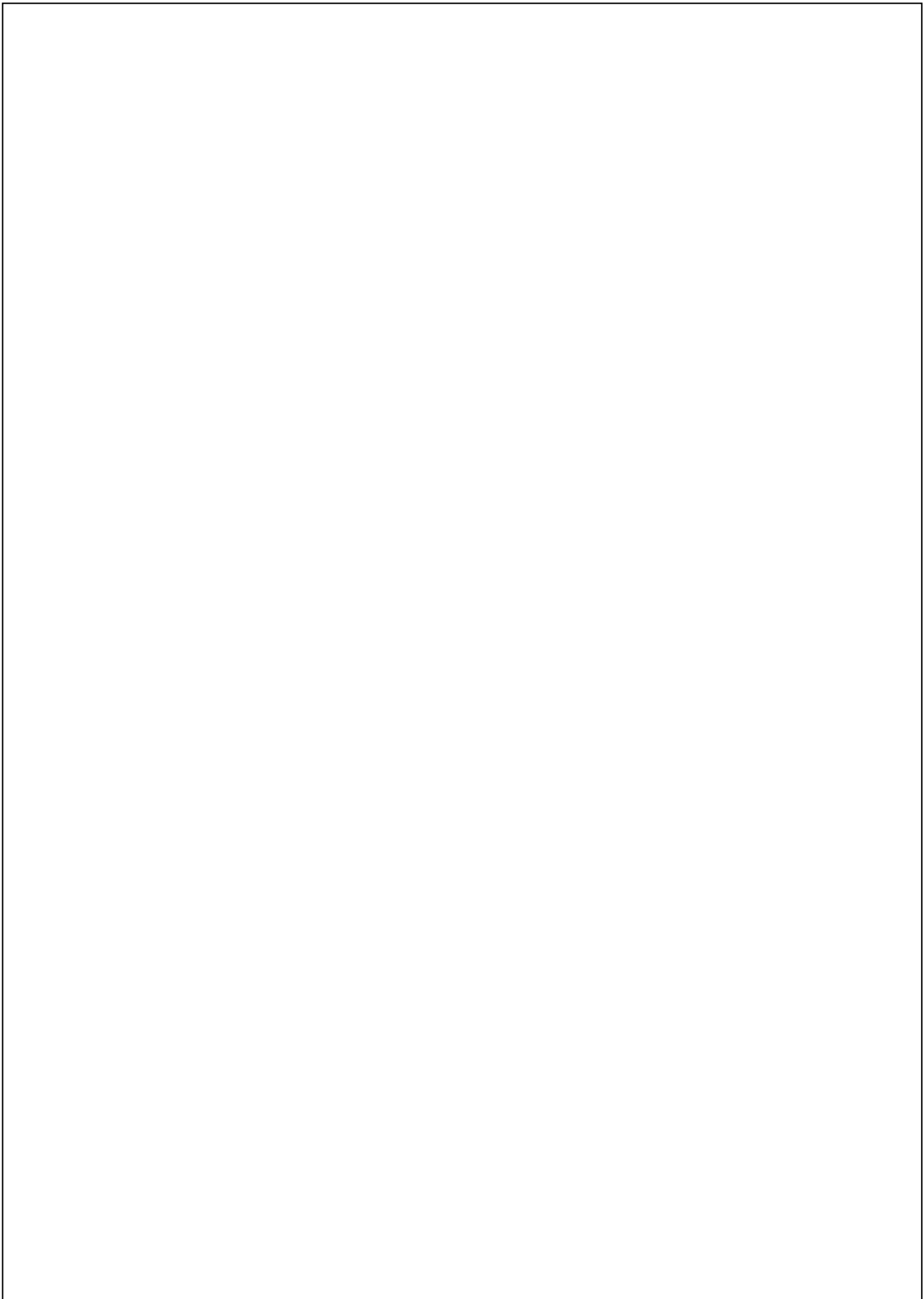
Pemerintah Kota Surakarta perlu memperbarui kebijakan akuntansi sesuai standar terbaru, mengembangkan sistem akuntansi berbasis teknologi, dan mensosialisasikan laporan secara daring untuk transparansi. Memastikan pelaporan keuangan diaudit secara independen dan melaksanakan evaluasi internal secara rutin untuk menjaga kualitas pelaporan dan mengidentifikasi potensi perbaikan. serta pelatihan berkala bagi pegawai diperlukan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan.

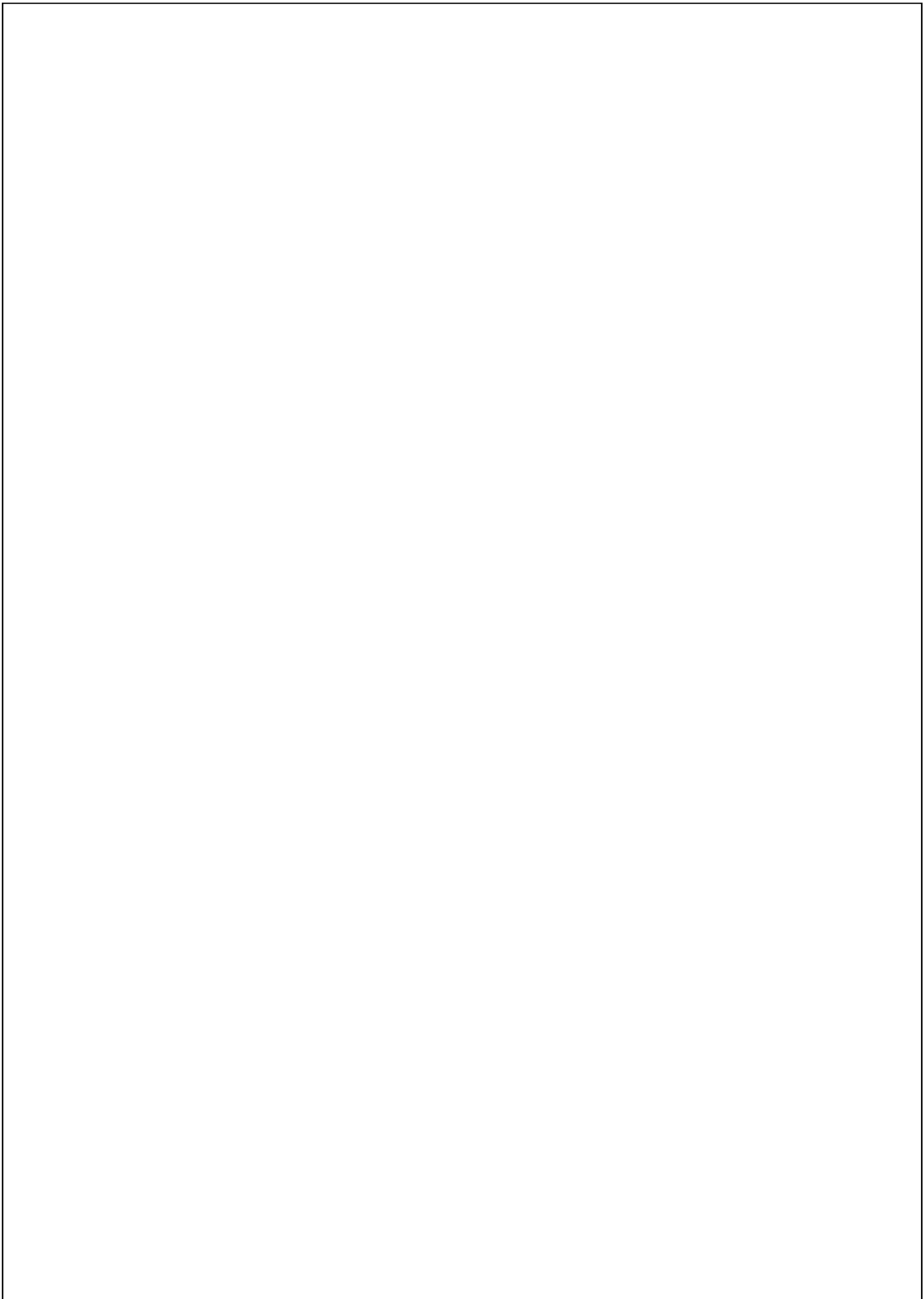
DAFTAR REFERENSI

- Baswir, Revrison. 2016. "Akuntansi Pemerintahan Di Simpang Jalan." *UNISIA*.
- Halim dan Kusufi. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Horngren, Charles T., dan Walter T. Harrison Jr. 2017. *Akuntansi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Kota Surakarta. 2023. "*Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 32.2 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta.*"
- Pemerintah Pusat. 1950. *Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Pemerintah Pusat. 2004. *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *SAP Standar Akuntansi Pemerintah (PP RI No. 24 Th. 2005)*. Jakarta.
- Pemerintah RI. 2010. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. Jakarta, Indonesia.
- Soemarso. 2018. *Akuntansi: Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Salemba Empat.









Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Surakarta

ORIGINALITY REPORT

27 %

SIMILARITY INDEX

27 %

INTERNET SOURCES

0 %

PUBLICATIONS

10 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docobook.com

Internet Source

27 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 8%

Exclude bibliography On

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Surakarta

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
